

**ANALISIS GENOSIDA MUSLIM UIGHUR DAN PENGARUHNYA TERHADAP
HUBUNGAN BILATERAL AMERIKA SERIKAT-CHINA**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Pada Program
Studi Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

Oleh :

FATHIYAH

4517023028

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS BOSOWA

MAKASSAR

2022

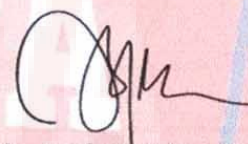
HALAMAN PENGESAHAN

ANALISIS GENOSIDA MUSLIM UIGHUR DAN PENGARUHNYA
TERHADAP HUBUNGAN BILATERAL AMERIKA SERIKAT-
CHINA**FATHIYAH****4517023028**

Skripsi telah disetujui dan diperiksa oleh :

Pembimbing I

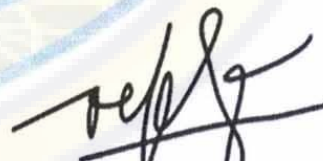
Pembimbing II

**Beche BT. Mamma S.ip., M.A.****Muh. Asy'ari, S.ip., M.A.**

Mengetahui

Dekan FISIP Universitas Bosowa

Ketua Prodi HI Universitas Bosowa

**Arif Wicaksono, S.Ip., M.A.****Zulkhair Burhan, S.Ip., M.A.**

HALAMAN PENERIMAAN

Pada hari Selasa Tanggal Dua Puluh Sembilan Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua Dengan Judul Skripsi **Nalisis Genosida Muslim Uighur Dan Pengaruhnya Terhadap Hubungan Bilateral Amerika Serikat- China**

Nama : **Fathiyah**
 Nomor Stambuk : **4517023028**
 Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
 Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional

Telah diterima oleh Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa Makassar Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana (S1) pada Program Studi Ilmu Hubungan Internasional



Panitia Ujian :

Arief Wicaksono, S.IP.,MA

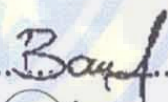
Ketua

Beche BT. Mamma, S.IP.,MA

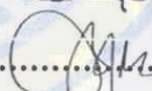
Sekretaris

Tim Penguji :

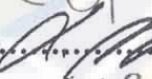
1. Beche BT. Mamma, S.IP.,MA

(......)

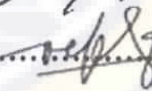
2. Muh. Asy'ari, S.IP.,MA

(......)

3. Arief Wicaksono, S.IP.,MA

(......)

4. Zulkhair Burhan S.IP.,MA

(......)

ABSTRAK

Kasus pelanggaran HAM terhadap etnis Uighur di Xinjiang merupakan salah satu isu yang menarik perhatian dunia Internasional, banyak negara yang turut terlibat dalam berupaya untuk menghentikan tindak kekerasan dan diskriminasi yang dilakukan pemerintah China kepada etnis Uighur, salah satunya adalah Amerika Serikat. Dalam kasus genosida yang terjadi pada etnis Uighur, Amerika Serikat banyak mengeluarkan kebijakan sebagai bentuk dukungannya terhadap etnis Uighur seperti mengeluarkan Uighur Human Right Policy Act dan pemblokiran aset dan pembatasan visa terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam kasus genosida muslim Uighur di Xinjiang. China menganggap AS terlalu dalam mencampuri masalah internal China dalam kasus genosida etnis Uighur, sehingga segala bentuk tindakan dan kebijakan yang dilakukan oleh AS akan berpengaruh bagi hubungan bilateral antara AS dan China. Penelitian ini akan di analisis menggunakan konsep hubungan bilateral dan konsep kebijakan luar negeri untuk membuktikan faktor-faktor yang mempengaruhi hubungan bilateral kedua negara akibat dari isu genosida muslim Uighur. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan menggunakan teknik telaah pustaka dalam pengumpulan data, baik dari buku maupun sumber-sumber lainnya berupa jurnal dan berita di internet dan media informasi lainnya.

Kata Kunci : Etnis Uighur, Genosida, AS-China, Hubungan Bilateral, Kebijakan Luar negeri

ABSTRACT

The case of human rights violations against the Uighur ethnic group in Xinjiang is one of the concerns that has drawn worldwide attention. Many nations are also involved in trying to put an end to the acts of violence and discrimination by the Chinese government against the Uighurs, one of which is the United States. In the case of genocide that occurred to the Uighurs, the US has issued many policies as a form of its support for the Uighurs, such as issuing the Uighur Human Rights Policy Act and blocking assets and restricting visas to parties involved in the genocide case of Uighur Muslims in Xinjiang. China, on the other hand, considers the US to be too deeply involved in China's domestic affairs in the case of the Uighur ethnic genocide so that all forms of actions and policies made by the US will affect bilateral relations between both countries. For this reason, utilizing the concepts of bilateral relations and foreign policy, the factors that impact bilateral relations between the two countries as a result of the issue of the Uighur Muslim genocide were investigated in this study. This study then used qualitative methods and literature review techniques to collect data, both from books and other sources, such as journals and news on the internet and other information media.

Keywords: Uighur Ethnicity, Genocide, US-China, Bilateral Relations, Foreign Policy

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penyusunan skripsi ini yang berjudul “Analisis Genosida Muslim Uighur dan Pengaruhnya Terhadap Hubungan Bilateral Amerika Serikat – China”. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) pada Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bosowa, Makassar.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih sangat jauh dari kata sempurna, maka dari itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan sehingga kedepannya penulis dapat memperbaiki segala kekurangan. Penulis juga menyadari bahwa dalam proses penelitian dan penyusunan skripsi ini, penulis mengalami banyak kendala dan halangan sehingga penyusunan skripsi ini tidak dapat terselesaikan dengan baik tanpa dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini dan juga selama penulis menjalani masa perkuliahan, yaitu kepada :

1. Bapak Arief Wicaksono, S.IP, M.A selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa Makassar.
2. Bapak Zulkhair Burhan, S.IP,M.A selaku ketua prodi Hubungan International Universitas Bosowa Makassar.
3. Ibu Beche BT Mamma, S.IP,M.A selaku pembimbing I peneliti yang memberikan arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Muh Asy'ary, S.IP, M.A selaku pembimbing II peneliti yang juga dengan sabar membantu dalam mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

5. Seluruh dosen dan staf akademik prodi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa Makassar yang telah membantu perkuliahan dan administrasi penulis dari awal hingga akhir masa perkuliahan penulis.
6. Seluruh teman-teman angkatan 2017 Hubungan Internasional dan Himpunan Mahasiswa Hubungan Internasional Universitas Bosowa Makassar.

Makassar, 20 Februari 2022

Penulis,



Fathiyah

UNIVERSITAS

BOSOWA



PERNYATAAN KEORISINALAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : FATHIYAH

Tempat/Tgl Lahir : Berau, 06 Juli 1999

NIM : 4517023028

Jurusan/Prodi : Ilmu Hubungan Internasional

Judul Skripsi : Analisis Genosida Muslim Uighur dan Pengaruhnya Terhadap Hubungan Bilateral Amerika Serikat-China

Dosen *pembimbing*. : 1. Beche BT Mamma, S.IP,M.A

2. Muh Asy'ary, S.IP, M.A

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya buat benar-benar hasil karya sendiri dan saya bertanggung jawab secara akademis atas apa yang saya tulis.

Pernyataan ini di buat sebagai salah satu syarat menempuh ujian meja/tutup.

Makassar 02 februari 2022

Penulis



FATHIYAH

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Batasan dan Rumusan Masalah.....	3
1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	3
1.4. Kerangka Konseptual	4
1.5. Metode Penelitian.....	6
1.5. Rancangan Sistematika yang di Bahas.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
BAB III GAMBARAN UMUM.....	11
3.1. Hubungan Bilateral Amerika Serikat-China	11
3.2. Genosida Muslim Uighur	15
3.3. Kebijakan China Terhadap etnis Uighur	17
3.4. Keterlibatan AS Dalam Kasus Genosida Muslim Uighur.....	18
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN.....	20
4.1. Analisis Hubungan AS dan China.....	20
4.2. Analisis Faktor Terlibatnya Amerika Serikat dalam Genosida Muslim Uighur	24
4.3. Analisis Kebijakan Luar Negeri AS Kepada Kelompok Etnis Uighur	26
4.5. Analisis Hubungan AS dan China Pasa disahkannya UU Uighur	34
BAB V PENUTUP	37
5.1. Kesimpulan.....	37
5.2. Saran.....	38

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Salah satu negara yang melakukan kejahatan genosida terhadap warga negaranya adalah China, dimana China melakukan diskriminasi kepada etnis Uighur yang sebagian besar masyarakatnya merupakan masyarakat yang beragama muslim. Konflik genosida yang terjadi pada umat muslim Uighur di Xinjiang dipicu oleh tindakan yang dilakukan oleh China yaitu memaksakan perubahan identitas etnis Han kepada etnis Uighur atau sinicization (Sinaga dan Yusril 2021). Mayoritas etnis Uighur menduduki wilayah Xinjiang akan tetapi adanya migrasi yang terjadi pada etnis Uighur membuat 45% dari wilayah Xinjiang berpenduduk etnis Han (Amalia, 2020). Migrasi tersebut dikabarkan bertujuan untuk menyingkirkan etnis Uighur dari wilayah Xinjiang (Elmira, 2018). Tidak hanya itu, pemarjinalan umat muslim Uighur di Xinjiang juga dikarenakan di wilayah Xinjiang terdapat sumber daya alam yang cukup besar (Manmid, 2018). Adapun sumber daya yang ada di Xinjiang diantaranya lain gas alam, batu bara dan fosil, tidak hanya itu Xinjiang juga merupakan jalur lintas perdagangan dan jalur penghubung antara Asia, Eropa dan Timur Tengah (Zhao, 2019).

Kejahatan yang terjadi saat ini terhadap etnis Uighur, selain dilakukan oleh pemerintah China dan aparatnya, para penduduk China keturunan etnis Han juga melakukan kejahatan dan pelecehan terhadap etnis Uighur, dimana mereka di perlakukan seperti penduduk Indian di Amerika (Saragih, 2015).

Tindakan represif yang diperbuat oleh pemerintah China kepada etnis Uighur menimbulkan reaksi publik dan pemerintah dari banyak negara, salah satunya adalah Amerika Serikat. Negara Amerika Serikat meminta agar China menghentikan pembantaian yang dilakukan kepada etnis Uighur, begitu pula dengan 22 negara lain yang

merupakan bagian dari PBB meminta agar China menghentikan aksi kejahatannya (Amalia,2020).

Sebagai negara dengan hak veto, Amerika Serikat mengecam China atas pelanggaran HAM yang telah mereka lakukan terhadap etnis Uighur, dimana AS mengeluarkan Uyghur Human Right Policy Act yang merupakan bentuk dukungan Amerika Serikat yang ingin membantu menyelesaikan kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Xinjiang (Harahap,2021)

Orang-orang yang ada dalam daftar laporan yang diajukan AS ke kongres akan mendapatkan sanksi berupa pemblokiran aset, pencabutan visa, dan dianggap tidak sesuai syarat untuk berkunjung ke Amerika Serikat. Meski begitu, konflik internal China ini merupakan salah satu konflik yang cukup sulit untuk diselesaikan dan mungkin mempengaruhi hubungan kerjasama bilateral kedua negara tersebut karena dalam perundang-undangan Tiongkok ada aturan tersendiri untuk mengamankan wilayah kekuasaannya, dengan mengimplementasikan prinsip tidak adanya intervensi dalam seluruh kerjasama internasional (Hidayat,2013).

Adapun alasan lain AS mengeluarkan UU Uighur tersebut diantaranya adalah dikarenakan pemerintah China memiliki sejarah panjang terkait kasus penindasan umat muslim yang merupakan kaum minoritas terutama etnis Uighur yang terletak di Xinjiang. Tidak hanya itu, pemerintah China juga pernah meluncurkan "Strike Hard Against Violent Extremism " yang merupakan bentuk kampanyenya dengan skala luas agar menjadi ancaman terorism secara internasional sehingga dijadikan dalih untuk membenarkan pembatasan yang luas akibat pelanggaran HAM yang cukup penting dari anggota etnis komunitas minoritas di Daerah kedudukan Uighur Xinjiang.

Sejak disahkannya UU Uighur tersebut China mendesak AS untuk berhenti menggunakan UU tersebut karena dianggap merugikan kepentingan China, China juga

beralasan bahwa kasus yang terjadi di Xinjiang bukanlah kasus Ham, etnis atau agama melainkan terkait keinginan untuk memerangi kekerasan, terorisme dan separatisme (Jaramaya,2020).

Dalam kurun waktu yang lama, persaingan antara AS dan China tertutupi oleh tuntutan untuk menjalankan kerjasama dalam berbagai bidang seperti ekonomi, dan geopolitik global. Namun kerjasama yang terjalin tersebut hampir seluruhnya hilang karena kasus pelanggaran Ham yang dilakukan terhadap etnis Uighur. Keputusan Amerika Serikat dalam pemberlakuan UU Uighur tersebut tentunya akan sangat berdampak bagi hubungan bilateral kedua negara ini.

1.2.Batasan dan Rumusan Masalah

1.2.1. Batasan Masalah

Batasan masalah dalam skripsi ini, akan berfokus pada dampak dan pengaruh genosida muslim Uighur terhadap hubungan bilateral yang sudah lama dan banyak terjalin antara kedua negara tersebut setelah di sahkannya UU Uighur.

1.2.2. Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini dan berdasarkan latar belakang yang telah penulis jelaskan, maka di tariklah satu rumusan masalah yang akan diteliti yaitu "Bagaimana Uighur Human Rights Policy mempengaruhi hubungan bilateral AS dan China?"

1.3.Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang akan diteliti maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dampak apa saja yang terjadi akibat konflik genosida Uighur terhadap hubungan bilateral AS-China pasca diterapkannya UU Uighur.

1.3.2. Kegunaan Penelitian

- a. Tulisan ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi tentang konflik genosida

Uighur dan kaitannya dengan hubungan bilateral AS-China

- b. Tulisan ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi pengkaji Hubungan Internasional yang juga sedang mengkaji konflik kasus yang serupa.
- c. Tulisan ini diharapkan bisa menjadi bahan bacaan bagi pengkaji HI untuk mengetahui lebih dalam tentang sisi lain dari genosida etnis Uighur.
- d. Tulisan ini diharapkan dapat digunakan penulis sebagai isyarat untuk menyelesaikan Studi S-1 dalam program Studi Hubungan Internasional, fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa Makassar.

1.4. Kerangka Konseptual

Dalam kerangka konseptual penulis akan menjelaskan keterkaitan antara variabel satu dan variabel lainnya berdasarkan konsep, teori, atau definisi tertentu. Adapun teori yang digunakan dalam meneliti masalah ini adalah :

1. Konsep Hubungan Bilateral

Dalam hubungan kerjasama bilateral kedua negara yang terlibat masing-masing ingin memenuhi kepentingan negaranya. Bilateralisme juga berpacu pada relasi politik dan budaya yang dilakukan oleh dua negara seperti penandatanganan atau perjanjian, pertukaran duta besar, serta kunjungan kenegaraan.

Kebanyakan kerjasama bilateral dilakukan oleh dua pemerintah yang sedang menghadapi masalah serupa secara bersamaan. Model kerjasama lainnya dilakukan oleh masing-masing negara di wadah oleh organisasi internasional. beberapa organisasi seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menetapkan bahwa kerjasama yang berlangsung diantara negara anggota organisasi tersebut dilakukan atas dasar pengakuan

kedaulatan nasional masing-masing negara Pola kerjasama bilateral meliputi proses (Perwita & Yani 2005:42).

1. Respon atau kebijakan aktual dari negara yang menginisiasi.
2. Persepsi dari respon tersebut oleh pembuat keputusan di negara penerima.
3. Aksi balik dari negara penerima keputusan.
4. Persepsi oleh pembuat keputusan dari negara penginisiasi.

Hubungan antar bangsa selalu terdorong oleh kebutuhan yang sulit dipenuhi oleh negara itu sendiri, sehingga banyak negara menjalin hubungan luar negeri dengan negara lainnya dalam konsep kerjasama yang memberikan keuntungan untuk masing-masing negara. Dalam Hubungan Internasional, yang dijalin oleh dua negara dapat dikatakan sebagai hubungan bilateral, hubungan yang dimaksud ini termasuk bidang ekonomi, politik dan pertahanan keamanan. Menurut Kusumohamidjoyo, hubungan bilateral di definisikan sebagai suatu kerjasama oleh dua negara baik yang letaknya dekat secara geografis ataupun yang jauh dengan tujuan utama untuk menciptakan perdamaian dengan memperhatikan kesamaan politik, kebudayaan, dan struktur ekonomi (Kusumohamidjoyo, 2019).

Kamus politik internasional menjelaskan bahwa hubungan bilateral adalah "keadaan yang menjelaskan adanya hubungan saling mempengaruhi atau hubungan timbal balik antara dua pihak (dua negara)" (Didi, 1993). Dari penjelasan terkait hubungan bilateral tersebut tentunya tidak lepas dari kepentingan nasional masing-masing negara dalam menjalin hubungan kerjasama sehingga terciptanya kesepakatan yang harus dipatuhi bersama.

Adanya interaksi antar negara satu dan lainnya terjadi karena masing-masing negara pasti memiliki ketergantungan dengan negara lainnya dikarenakan banyak negara

tidak mampu memenuhi kepentingannya atau kebutuhannya sendiri sehingga perlu menjalin hubungan timbal balik dengan negara lain, hal ini sesuai dengan teori yang di jelaskan dalam buku teori,etika dan kebijakan hubungan internasional bahwa “Saling ketergantungan antara negara satu dengan negara lain di dunia ini adalah kenyataan yang harus di hadapi oleh semua negara. Untuk memenuhi kebutuhannya masing-masing, maka terbentuklah suatu kerjasama diantara negara dalam berbagai bidang kehidupan” (Rudi,1993). Oleh karena itu Perkembangan interaksi antar negara akan berjalan sesuai dengan keterkaitan kebutuhan masing-masing negara yang berinteraksi. Dan interaksi

1.5. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis berencana untuk menggunakan tipe penelitian kualitatif.

2. Jenis & Sumber Data

a. Data Sekunder

Data yang penulis peroleh dan cantumkan dalam proses pembuatan proposal penelitian ini adalah data sekunder yang penulis baca berupa Jurnal, berita online, dan artikel online. Yang terpercaya sumbernya, terkait konflik genosida Uighur dan hubungan bilateral AS-China.

3 Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Pustaka

Dalam proposal penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu adalah studi pustaka, dimana penulis melakukan penelusuran dengan berbagai literatur seperti Jurnal online, artikel online, dan berita online. Terkait Konflik Uighur

dan hubungan bilateral AS-China

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik analisa Kualitatif, dimana penulis menggunakan analisa ini dengan menarik kesimpulan dari fakta yang diambil dari sumber-sumber seperti studi pustaka, berita online, dan jurnal. Sehingga penulis dapat menganalisis data sesuai dengan kasus yang dibahas.

1.5.Rancangan Sistematika yang di Bahas

Penelitian ini akan terbagi dalam (5) bab, sebagai berikut, pada bab pertama; penulis akan memaparkan latar belakang masalah penelitian, identifikasi masalah, metode penelitian, teknik pengumpulan data, serta sistematika pembahasan; pada bab kedua penulis akan menjelaskan tentang tinjauan pustaka yang berisi literatur dari penelitian terdahulu. Pada bab ketiga penulis akan menjelaskan hubungan AS-China beserta kebijakan-kebijakan yang diambil dalam konflik genosida etnis Uighur. pada bab keempat penulis akan memaparkan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi hubungan bilateral AS-China dalam genosida Uighur, kemudian Pada bab terakhir yaitu bab kelima akan menuliskan kesimpulan analisa penelitian yang di tarik dari keempat bab tersebut.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Pada penelitian yang terdahulu ada banyak yang membahas terkait konflik yang terjadi di Uighur Xinjiang. Namun, masih sangat minim dijumpai penelitian yang membahas dampak dari konflik Uighur terhadap hubungan bilateral Amerika Serikat dan China yang dimana dalam konflik Uighur ini, Amerika Serikat cukup banyak terlibat dalam menyelesaikan konflik di Uighur tersebut. Maka dari itu penulis tertarik meneliti dampak dari konflik Uighur terhadap hubungan bilateral Amerika Serikat dan China dengan menghimpun beberapa penelitian terdahulu yang sedikit banyaknya memiliki relevansi terkait isu yang diangkat pada penelitian kali ini, adapun penelitian terdahulu yang dijadikan bahan referensi diantaranya adalah :

1. Tibet : Problems, Prospects, and U.S. Policy

Tulisan Kerry Dumbaugh ini menjelaskan tentang kebijakan kebijakan yang dikeluarkan Amerika Serikat tentang kasus Tibet. Pada penelitian ini diterangkan bahwa kasus Tibet sudah menarik perhatian Amerika Serikat dari tahun 1980, dimana pada saat itu isu ini sudah di agendakan Amerika Serikat kedalam kebijakan luar negerinya terhadap China. Dukungan Amerika Serikat terhadap kasus Tibet dianggap sebagai ancaman oleh China karena menganggap bahwa Amerika Serikat memiliki agenda dan kepentingan khusus di Tibet. Dari tulisan ini, Kerry Dumbaugh menganggap bahwa isu Tibet ini adalah kasus yang cukup rumit untuk hubungan diantara kedua negara ini bahkan kasus ini beberapa kali menjadi bahan debat bagi para pembuat kebijakan Amerika Serikat (Dumbaugh,2008)

2. Dinamika Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat Terhadap Kelompok Uighur Periode 2002-2011

Dalam tulisan karya Monica Dian Adelina ini menjelaskan tentang kebijakan luar negeri yang Amerika Serikat keluarkan terkait isu etnis Uighur dikarenakan adanya kepentingan nasional Amerika Serikat yang ingin ia capai. Terlihat dari dukungan yang terus-terusan diberikan Amerika Serikat kepada etnis Uighur yang dimana pada periode 2002-2011 terdapat peristiwa 9/11 yang menurut penulis seharusnya sikap yang diambil Amerika Serikat pada saat itu adalah menarik full dukungannya terhadap etnis Uighur karena kelompok ini pernah dianggap menjadi bagian dari kelompok teroris. Namun faktanya Amerika Serikat pada waktu itu beberapa kali masih memberikan dukungannya.

Faktor lain yang juga mempengaruhi kebijakan luar negeri Amerika Serikat yang dijelaskan pada tulisan karya Monica Dian ini adalah bangkitnya perekonomian China dan kepentingan strategi Amerika Serikat yang ingin mereka dapatkan di wilayah Xinjiang yang dimana wilayah tersebut berbatasan langsung dengan berbagai wilayah negara yang cukup berpengaruh bagi Amerika Serikat (Adelina,2012)

3. Keterlibatan Negara Lain Dalam Penyelesaian Konflik Muslim Uighur Prespektif Siyasah Dauliyah

Dalam skripsi karya Rahma Amaliah ini dijelaskan bahwa terlibatnya negara lain dalam usahanya mengakhiri konflik di Uighur ini berupa seperti dukungan, kecaman, dan tindakan langsung secara individu oleh beberapa negara. Salah satu negara tersebut adalah Amerika Serikat yang memberi sanksi kepada para pejabat atau perusahaan China yang memiliki keterlibatan atas kasus genosida muslim di Uighur. Bahkan dalam tulisan ini juga dijelaskan keterlibatan PBB dalam memberikan peringatan agar dihentikannya segala bentuk pelanggaran dan diskriminasi terhadap etnis muslim Uighur dan juga mendesak China agar memberikan akses tanpa halangan apapun kepada PBB (Amalia,2020)

4. Dinamika Kemanusiaan Muslim Uighur di China

Dalam jurnal yang di tulis oleh Nevi Rusmarina, Maulana Irsyad, Mufarikhin, dan Ahmad Maulana Feriansyah membahas tentang masalah kemanusiaan muslim Uighur di China, yang dimana China banyak menerapkan ideologi-ideologi komunis untuk menghasut muslim Uighur dengan menyiksa, mengurung, hingga melakukan pernikahan paksa oleh suku asli China dan suku Uighur agar suku Uighur membaaur dengan suku asli China sehingga hal itulah yang mendasari pendapat bahwa pelanggaran HAM terhadap muslim uighur masih terus berlanjut (Dewi,2020).

5. Etnisitas dan Politik Luar Negeri : Respon Turki Terhadap Penindasan Etnis Uighur di Xinjiang

Dalam skripsi karya Felicia Amelia S, membahas tentang kondisi etnis Uighur yang berbeda dengan mayoritas etnis China mengakibatkan munculnya tekanan dari pemerintah China karena etnis Uighur menolak untuk menjadi bagian dari China. Adanya tekanan dari pemerintah China ini menyebabkan resistensi dan separatisme etnis Uighur. Dalam kasus ini, Turki yang erat ikatannya dengan muslim Uyghur dari sisi kesamaan historis, budaya, bahasa dan agama memberikan reaksi tegas melalui protes Perdana Menteri Erdogan dan publik Turki melalui demonstrasi maupun media massa. (Amelia,2013).

Dari literatur diatas yang dijadikan bahan referensi oleh penulis, terdapat kesamaan dimana ketiganya membahas terkait Konflik etnis Uighur dan keterlibatan Amerika Serikat dalam menyelesaikan isu tersebut, namun dalam tulisan ini penulis akan mencari jawaban dari isu yang hampir serupa namun berbeda konteks dimana penelitian sebelumnya membahas tentang maksud dan tujuan Amerika Serikat dalam menyelesaikan konflik Uighur, tapi pada tulisan ini penulis akan mencari tau bagaimana dampak dari isu etnis Uighur ini terhadap hubungan bilateral Amerika Serikat dan China.

BAB III

GAMBARAN UMUM

3.1. Hubungan Bilateral Amerika Serikat-China

A. Hubungan AS-China Secara Umum

Pertumbuhan ekonomi China yang sangat pesat membuat hubungan kerjasama ekonomi-politik Amerika Serikat dan China semakin terjalin erat dan ketergantungan satu sama lain. Hubungan kerjasama antara AS dan China tidak terlepas dari peran sosok Deng Xiaoping yang dikenal sebagai tokoh arsitek perekonomian China empat dekade yang lalu, berkat sosok Deng Xiaoping terjadi reformasi besar-besaran yang membuat China menempati posisi kedua dalam peringkat negara dengan ekonomi terbesar (Wardhani, 2010).

Hubungan yang terjalin diantara Amerika Serikat dan China berlangsung dikarenakan berbagai kunjungan kenegaraan antara kedua negara guna membicarakan kepentingan dan kerjasama ekonomi dan politik. Hubungan kerjasama antara kedua negara tersebut dianggap penting karena bertujuan untuk meningkatkan hubungan dagang dan politik mereka. Sehingga tanggal 26 Maret 1997, Al Gore yang merupakan Wakil Presiden AS pada masa tersebut berkunjung ke China guna membahas hubungan kerjasama timbal balik (bilateral) bagi kedua negara tersebut (Wardhani,2010).

Dalam konteks global, China telah bergabung dengan beberapa organisasi International, diantaranya adalah WTO (World Trade Organization), APT (ASEAN Plus Three), APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation) OPEC, G-20, dan juga Shanghai Cooperation Organisation (SCO). Dalam konteks regional, China dan ASEAN telah menyepakati dibentuknya zona perdagangan bebas China-ASEAN (ASEAN-China Free Trade Area, ACFTA) yang diberlakukan di semua negara ASEAN mulai Desember 2009 tentunya hal tersebut tidak lepas dari dorongan Amerika Serikat (Atmaja,2017).

Terjalin normalnya hubungan Amerika Serikat dan China baru dimulai di tahun 1979, yang dimana hubungan ini memberikan dampak positif berupa keuntungan bagi China karena meningkatkan perdagangan dari negara tersebut dan juga bentuk keterlibatan damai dalam keseimbangan regional dan global dan mencegah ancaman agresi Uni Soviet (Ardhani,2019).

Amerika Serikat menjadi rekan dagang China pada urutan ketiga setelah Jepang dan Hongkong dan terus meningkat hingga pada saat tahun 1986 Amerika Serikat sepakat atas menyediakan energi dan teknologi yang di peruntukkan pembangunan industri listrik di China dan pada saat itu juga Amerika Serikat terus memantau berkembangnya teknologi nuklir karena rasa cemas apabila teknologi tersebut dikembangkan untuk menjadi senjata militer atau senjata nuklir yang mungkin saja akan terjadi sebaliknya yaitu mengancam Amerika Serikat sendiri yang merupakan negara super power (Ardhani,2019).

Hubungan Amerika Serikat dan China pada masa kepemimpinan George H.W Bush (Presiden AS) dan Hu Jintao (Presiden China) periode 2003-2008, presiden AS yaitu George H.W bush beberapakali melakukan kunjungan ke China salah satunya adalah pada saat tanggal 20 November 2005 dimana kunjungan tersebut bertujuan untuk membicarakan kebebasan beragama, hak asasi dan perdagangan (VoaIndonesia,2005). Dan pada masa kepemimpinan presiden Barack Obama (Presiden As) dan Hu Jintao (Presiden China) periode 2008-2013, Barack Obama juga beberapa kali berkunjung ke China dan sepakat untuk berhadapan dengan pengaruh global untuk mengatasi sejumlah masalah dan berterus terang untuk menciptakan hubungan yang positif, kooperatif, dan komprehensif (Ardhani,2019). Pada periode 2013-2017 dimana AS dan China berada di bawah kepemimpinan Barack Obama dan Xi Jinping kedua negara ini makin mempererat hubungan bilateralnya dengan kunjungan presiden Xi Jinping ke Amerika Serikat yang bermaksud untuk meneruskan pembahasan terkait ekonomi dan strategi (Manalu,2017). Pada bulan Juni Tahun 2013 presiden Xi Jinping berkunjung tanpa dasi bersama presiden Barack Obama dimana

pertemuan tersebut bertujuan untuk membuka sebuah jalan bagi hubungan keduanya agar tidak berbenturan, tidak berkonfrontasi, saling menghormati, bekerjasama dan menang bersama (Id China Embassy,2014). Dan pada periode 2017-2018 dibawah kepemimpinan Donald Trump dan Xi Jinping, kedua negara tersebut terlibat dengan hubungan perdagangan. Periode ini merupakan tahun yang paling panas bagi kedua negara tersebut dikarenakan perang dagang.

Hubungan dagang antara Amerika Serikat sendiri sudah terjalin dari lama, dimana saat China memberi ruang terhadap perekonomiannya sehingga Amerika Serikat masuk dalam siklus hubungan dagang bersama China. Dalam menjalin hubungan kedua negara seringkali mengadakan kunjungan ke negara masing-masing secara bergantian dimana kunjungan tersebut bertujuan untuk kepentingan ekonomi, politik, dan sosial bagi masing-masing negara, tidak hanya itu Amerika Serikat dan China juga tergabung dalam organisasi internasional yang sama sehingga membuat hubungan kedua negara tersebut saling ketergantungan (Ardhani,2019).

B. Hubungan AS-China pasca disahkannya UU Uighur

Dalam memaksakan hukum internasional sanksi dianggap sebagai salah satu alat untuk mengancam suatu negara. Sanksi merupakan bentuk dari keputusan policy choices yang dilakukan berdasarkan pertimbangan untung rugi.

Undang-undang Uighur ini mengarahkan Presiden AS untuk menjatuhkan sanksi terhadap individu dan entitas asing yang bertanggung jawab atas pelanggaran HAM di wilayah Otonomi Uyghur Xinjiang China. Meninjau isi dokumen Undang-Undang Kebijakan Hak Asasi Manusia Uyghur tahun 2020 berisi ketentuan sebagai berikut :

"The President shall periodically report to Congress a list identifying foreign individuals and entities responsible for such human rights abuses. The President shall impose

(1) property blocking sanctions on the identified individuals and entities, and (2) visa-blocking sanctions on the identified individuals. The bill requires reports to Congress on (1) human rights abuses in Xinjiang; (2) efforts to protect U.S. citizens and residents, including ethnic Uyghurs and Chinese nationals studying or working in the United States, from harassment and intimidation by the Chinese government; and (3) the Chinese government's acquisition and development of technology to facilitate internment and mass surveillance in Xinjiang." (Congress.gov, 2020).

Penerapan sanksi aset blocking terhadap orang yang diidentifikasi dalam laporan pelanggaran berdasarkan The International Emergency Economic Powers Act (50 U.S.C. 1701 et seq.) (Govtrack.us, 2020) yakni melarang dan memblokir semua transaksi kepentingan properti yang berada di Amerika Serikat; datang di Amerika Serikat; atau berada dalam kepemilikan atau kendali orang Amerika Serikat. Aturan pembatasan visa, yakni tidak diterima di Amerika Serikat; tidak memenuhi syarat lainnya menerima visa lainnya untuk memasuki Amerika Serikat. Menurut penulis model sanksi dalam UU ini juga menawarkan sebuah model smart sanction atau targeted sanction. Konsep smart sanction atau targeted sanction merupakan model sanksi ekonomi yang ditujukan kepada elit politik negara target guna meminimalisir dampak negatifnya kepada masyarakat sipil (Rosyidin & Fitrah, 2016). Targeted sanction dalam UU ini ditujukan kepada pejabat Tiongkok yang terlibat, maka bentuk sanksinya pun untuk individu dengan diberlakukan pembekuan aset di luar negeri (Amerika Serikat), pembatasan pembatasan visa dan sebagainya. Dalam praktiknya undang-undang ini mendesak keterlibatan Amerika Serikat dalam masalah diskriminasi kaum Uighur untuk menerapkan Global Magnitsky dan sanksi terkait, serta menerapkan Undang-Undang Kebebasan Beragama Internasional dan tinjauan kontrol ekspor Departemen Perdagangan kepada pemerintah Tiongkok. Melihat semakin kuat hegemoni negara sender, yakni kekuatan

Amerika Serikat untuk mendukung kebijakan sanksinya, maka pengaruhnya di dunia internasional akan semakin tinggi pula

3.2. Genosida Muslim Uighur

Salah satu konflik internal China yang melibatkan negara lain adalah genosida terhadap etnis muslim Uighur di Xinjiang. Kelompok muslim Uighur sendiri merupakan kelompok yang memiliki keturunan Turki dan menjalani kehidupan di kawasan Asia Tengah dan Timur, terjadinya diskriminasi kepada etnis muslim Uighur di Tiongkok kini mengakibatkan konflik antara etnis Han dan kelompok minoritas etnis Uighur. Pemerintah China telah bertindak salah terkait kasus HAM kepada kaum Uighur di Xinjiang dengan membatasi kegiatan beragama karena dominasi Pemerintah China yang tidak memperbolehkan kaum Muslim Uighur di Xinjiang untuk beribadah sesuai agamanya dan juga warga kaum Muslim Uighur dilarang Sholat dan berpuasa pada saat bulan Ramadhan (Harahap,2021).

Sejak tahun 1995- 1999 pemerintah China menghancurkan sebanyak tujuh puluh tempat ibadah dan mencabut perizinan 44 imam yang menolak tindakan pemerintah China. Tidak hanya itu, China juga dengan resmi membuat larangan beribadah untuk individu di tempat-tempat milik negara. Diskriminasi yang dialami oleh kelompok muslim Uighur dikarenakan keinginan pemerintah China atas tercapainya One Tiongkok Policy atau kebijakan satu Tiongkok. Dalam kasus ini, Pola-pola intergratif Pemerintah China dalam melakukan civic education ternyata belum berhasil dalam menyatukan kaum muslim Uighur dengan penduduk mayoritas China lainnya. Peristiwa kejahatan dan diskriminasi yang dialami etnis Uyghur di Tiongkok sudah dapat dikatakan menjurus kepada genosida, dimana pemerintah Tiongkok melakukan upaya etnis cleansing yang diawali dengan kebijakan pemerintah Tiongkok yang memojokkan etnis Uighur sehingga terjadinya propaganda oleh pemerintah Tiongkok dan muslim Uighur dijadikan sebagai tumbal dan di tuduh atas kasus yang menelan banyak korban yang terjadi pada tanggal 5 Juli 2009 (Harahap,2021).

Padahal kejadian yang sesungguhnya ada sekitar 200 muslim Uighur yang tewas dan 1700 muslim etnis Uighur yang terluka, sehingga propaganda tersebut semakin parah dan membuat kemarahan etnis Han semakin memuncak kepada etnis Uighur (Saragih,2015).

Penderitaan kaum muslim Uighur semakin terasa pada saat terjadinya ledakan 9/11 di Amerika Serikat, karena Pemerintah Tiongkok langsung menegaskan bahwa gerakan separatisme anti pemerintahan di Xinjiang ada keterkaitannya atas gerakan yang dipimpin oleh teroris Internasional Osama bin Laden (Harahap,2021).



3.3. Kebijakan China Terhadap etnis Uighur

Keberadaan etnis Uighur beserta sejarah terkait kepentingan China di Xinjiang sudah tercatat disejarah selama berabad-abad. Tiongkok/China dinyatakan telah memaksakan kekuasaannya terhadap Xinjiang pada zaman kekaisaran dinasti Han hingga saat ini. Sejak ditemukan minyak yang menjadikan kondisi perekonomian wilayah Xinjiang semakin dinilai tinggi dan mengakibatkan pemerintah China semakin tidak ingin membiarkan wilayah Xinjiang begitu saja. Di wilayah Xinjiang terdapat sumber daya energi yang memiliki cadangan gas alam dan batu bara dengan persentase cadangan batu bara sebesar 40% dan juga cadangan minyak gas yang ditemukan didaerah Tarim, Junggar, dan Turpanhami yang merupakan bagian dari wilayah Xinjiang sebanyak sepertiga dan seperempat untuk masing-masing daerah dari total negara (Fatkasari & Fithriana, 2019).

Dengan kondisi-kondisi yang berbatasan langsung dengan kawasan Asia Tengah yang menjadi alasan Xinjiang dimasukkan kedalam jalur sutra Tiongkok sehingga menimbulkan kesenjangan dan rasa cemburu terhadap kelompok Uighur yang menduduki wilayah Xinjiang sehingga pada kisaran tahun 1950 pemerintah China menjalankan kebijakan migrasi domestik etnis Han kewilayah Xinjiang. Dengan adanya kebijakan tersebut, terjadilah kerusuhan di Xinjiang (Fatikasari & Fithriana, 2019). Kebijakan lain yang dilakukan oleh pemerintah China adalah dengan mendirikan camp “Reedukasi” untuk kelompok muslim etnis Uighur pada bulan mei 2014, kamp ini dilakukan secara diam-diam atau rahasia dan menyalahi sistem hukum, kamp reedukasi ini sengaja dibuat oleh China hanya untuk orang-orang etnis Uighur di wilayah Xinjiang (Republika.co.id, 2009).

Dalam operasi kamp khusus yang dibuat oleh pemerintah China tersebut, masyarakat etnis Uighur dipaksa untuk menjalankan indoktrinisasi politik, belajar bahasa Mandarin, bernyanyi lagu pujian untuk partai komunis Tiongkok, dan menghafal aturan yang berlaku. Jutaan etnis Uighur ditahan dan mereka dipaksa untuk meninggalkan identitas agama dan

budaya mereka (Aljazeera.com,2018). Tidak hanya itu, etnis Uyghur yang menganut agama islam mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan, mereka dilarang untuk menjalankan agama mereka dan pemerintah menutup tempat beribadah dan tempat belajar agama untuk mereka (Fatikasari & Fithriana).

3.4. Keterlibatan AS Dalam Kasus Genosida Muslim Uighur

Kasus Uighur nyatanya merupakan salah satu isu yang menarik perhatian dan perdebatan di politik Amerika Serikat (Chen,2010). Dalam proses analisis dokumen ditemukan kata Uighur pada dokumen legislatif pada tahun 1989 dan terdapat dalam website Library of Congress sebanyak 46 kali, AS menunjukkan keterlibatan dan dukungannya terhadap etnis Uyghur dengan sahnya HR 497 bahwa “China harus mengakui hak-hak masyarakat Uighut” oleh DPR AS. Dapat dilihat bahwa genosida muslim Uighur adalah salah satu isu yang menjadi perhatian dari legislatif AS (Adelina,2012).

Keterlibatan dan dukungan AS juga di tunjukkan dengan dikeluarkannya Uighur Human Right Policy Act agar China menghentikan aksi kekerasannya terhadap etnis Uighur. Rancangan UU tersebut akhirnya di sahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat pada tanggal 11 September 2019 dengan pemungutan suara 407-1 hingga pada akhirnya undang-undang tersebut di tandatangani oleh presiden Trump dan dijadikan Undang-undang pada tanggal 17 Juni 2020 (Harahap,2021). Dalam UU tersebut mengerahkan Direktur Intelejen Nasional untuk dilaporkan kepada kongres bahwasanya terjadi masalah yang di akibatkan oleh tindakan represif yang yang dilaporkan Pemerintah Tiongkok terhadap etnis muslim Uighur di Xinjiang. Tidak hanya itu, dalam laporan yang diserahkan presiden Donald Trump ke kongres menunjuk para petinggi-petinggi Tiongkok dan individu lain untuk bertanggung jawab atas penyiksaan, penahanan, perlakuan kejam dan kelakuan yang tidak manusiawi yang merendahkan kelompok muslim Uighur. Pihak yang dimaksud dalam

laporan tersebut akan dikenakan sanksi berupa pemblokiran aset, pencabutan visa, dan tidak memenuhi syarat untuk berkunjung ke Amerika Serikat (Saragih,2015).



BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan menganalisis terkait faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi hubungan bilateral antara Amerika Serikat dan China akibat dari genosida muslim etnis Uyghur yang terjadi di Xinjiang dengan menggunakan konsep hubungan bilateral dan konsep kerjasama luar negeri. Konsep ini diharapkan untuk dapat menggambarkan hubungan diantara kedua negara setelah kejadian genosida muslim Uyghur.

4.1. Analisis Hubungan AS dan China

Konflik muslim etnis Uyghur yang terjadi diwilayah Xinjiang, cukup menjadi perhatian oleh banyak negara di belahan dunia, banyak negara yang memberikan respon terhadap konflik yang terjadi kepada muslim Uyghur termasuk Amerika Serikat. Pembahasan terkait hubungan yang terjalin antara AS dan China akan dimulai dengan sedikit pembahasan sejarah hubungan kedua negara, dikarenakan terdapat kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh AS terkait isu genosida muslim Uighur ini merupakan bagian dari sejarah panjang antara hubungan AS dan China.

Pada tahun 1970an tidak banyak hubungan yang terjalin antara AS dan China dikarenakan pada periode tersebut terjadi perang Vietnam dan adanya pengaruh oleh komunis China yang dimana pada saat itu Amerika Serikat menganggap China adalah sekutu Moskow, salah satu usaha yang dilakukan AS untuk membendung pengaruh komunis Soviet, AS turut mendukung pemberontakan yang terjadi daerah batasan China yang didalamnya terdapat wilayah Tibet dan Xinjiang. Sengketa perbatasan antara Uni Soviet dan China ditahun 1969 menunjukkan bahwa kedua negara tersebut tidak lagi berhubungan dengan baik oleh karena itu, Nixon selaku presiden AS pada saat itu menganggap China sebagai salahsatu sekutu yang layak (Hamilton,1994).

Hubungan aliansi antara AS dan China diawali dengan kunjungan Nixon di tahun 1972 sebagai presiden AS, dimana kunjungan tersebut didasari oleh kepentingan AS di China pada waktu itu adalah karena pengaruh kekuatan China dalam melawan Soviet, Korea Utara, dan Vietnam sehingga AS menyampingkan kasus-kasus lain seperti pelanggaran HAM yang terjadi di China (Adelina,2012).

Kerjasama diantara AS dan China masih didasari rasa tidak percaya atau curiga dan kepentingan kedua negara, dikarenakan Amerika Serikat masih saja tidak ingin menyalurkan bantuan militer kepada China begitupula dengan China yang masih enggan untuk menjadi sekutu dari AS dikarenakan keterlibatan AS dalam masalah China dan Taiwan (Adelina,2012).

Isu Ham baru mulai menjadi landasan dari kebijakan AS pada tahun 1976 dikarenakan hal tersebut merupakan gagasan dari presiden Carter yang menggantikan Nixon sebagai presiden AS pada saat itu. Pada saat AS dibawah kepemimpinan Carter , Amerika Serikat mulai menjadikan isu Ham yang terjadi di China sebagai masalah seperti konflik China dan Taiwan serta konflik Tibet dan etnis Uighur di Xinjiang, dimana pada saat itu Deng Xioping selaku presiden China pada saat itu menolak intervensi yang dilakukan oleh AS terhadap wilayah negaranya (Fairbanks, 2002).

Berlanjut kepada nasa kepemimpinan presiden Reagen dan Bush, kedua negara msih belum menemukan titik penghubung untuk kerjasama diantara AS dan China dikarenakan isu Ham yang msih terjadi, meskipun pada masa itu perdagangan diantara kedua negara masih terjadi. Hal serupa masih terus berlanjut pada masa pemerintahan Clinton dimana isu Ham masih menjadi penghalang utama untuk jalinan kerjasama diantara kedua negara, dimana pada saat itu AS menjadikan isu Ham dan demokrasi sebagai kepentingan nasionalnya (Adelina,2012).



Hubungan antara AS dan China mencapai titik krisis ditahun 90an dan awal tahun 2000, pada periode tersebut terjadi berbagai insiden diantaranya ledakan bom kedutaan China di Belgrade pada bulan Mei 1999, konfrontasi ditengah tentara China dan pesawat mata-mata Amerika Serikat dibulan April 2011 dan terjualnya alat militer AS ke China sebanyak 4M dollar AS. Berdasarkan hal tersebut AS menganggap China sebagai rival di area Asia sehingga AS berencana untuk menjadikan Taiwan sebagai sekutu karena ingin memisahkan diri dari China (Adelina,2012). Setelah kejadian tragedi 9/11, hubungan antara AS dan China baru mulai mengalami perubahan, presiden George W. Bush pada saat itu beranggapan bahwa China dapat berkontribusi dalam kampanye GWOT Amerika Serikat, yang dimana kampanye tersebut dibuat dalam rangka melawan terorisme di kawasan Asia Timur dan Asia Tengah, bahkan presiden George W. Bush menganggap China dapat diajak untuk bersekutu terkait isu perang yang terjadi di Irak. Pada saat itu Presiden Bush menganggap bahwa isu yang terpenting dan lebih mendesak saat itu hanyalah isu terorisme (Garver,2003). Hubungan kedua negara terus berlanjut hingga ke periode masa kepemimpinan Presiden Obama, dimana hubungan kedua negara menuju kearah yang lebih positif dari sebelumnya.

Dari penjaelasan sejarah yang penulis uraikan diatas, hubungan yang terjalin diantara kedua negara yaitu AS dan China, di pengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya adalah kepentingan Ekonomi dan kepentingan Strategis. Dimana kedua kepentingan tersebut berusaha dicapai oleh AS dengan melibatkan dirinya terhadap kasus genosida muslim Uighur yang terjadi diwilayah Xinjiang, dimana letak wilayah Xinjiang dapat dikategorikan sangat strategis karena berbatasan langsung dengan negara-negara penting.

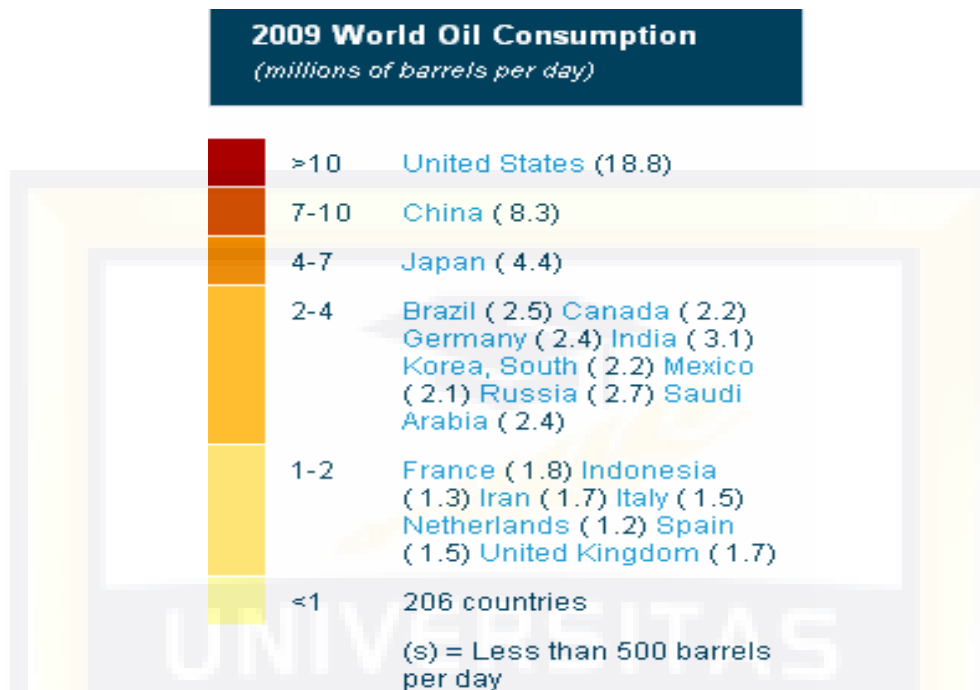
4.2. Analisis Faktor Terlibatnya Amerika Serikat dalam Genosida Muslim Uighur

Penulisan ini, mengemukakan Hipotesa pertama yang mendasari kebijakan luar negeri AS atas keterlibatannya terkait konflik genosida muslim Uighur yang terjadi di Xinjiang adalah karena adanya maksud dan tujuan yang ingin di capai oleh AS, yaitu kepentingan nasional dalam konteks ekonomi, yang dimana kepentingan ekonomi yang diinginkan adalah berupa kebutuhan minyak dan gas Amerika Serikat yang semakin meningkat dan wilayah Xinjiang merupakan wilayah yang memiliki gas dan minyak yang cukup banyak sehingga wilayah Xinjiang dapat dikatakan sebagai sumber minyak dan gas andalan bagi negara China. Dan hipotesa kedua pada penulisan ini adalah kepentingan AS terhadap peningkatan dari ekonomi China yang sekaligus juga menjadi ancaman buat AS sehingga keterlibatan AS dalam konflik Uighur dapat dapat mengancam peluang kerjasama atau hubungan bilateralnya dengan China. Kedua Hipotesa ini akan dibuktikan dengan beberapa data agar dapat dilihat kebenarannya.

4.2.1. Faktor Ekonomi Minyak dan Gas di Wilayah Xinjiang

Kebutuhan Amerika Serikat akan minyak dan gas semakin tinggi namun produksi domestiknya semakin rendah, puncak produksi Amerika Serikat berlangsung di tahun 1970 dan hasilnya yang mencapai 9,64 Juta barrel perhari. Di tahun 2009 AS menduduki posisi paling tinggi dengan kategori negara pengonsumsi minyak paling banyak di dunia, hal ini didukung oleh data pada gambar 4.2.1

Ganmbar 4.2.1 Negara Pengonsumsi Minyak Terbesar ditahun 2009

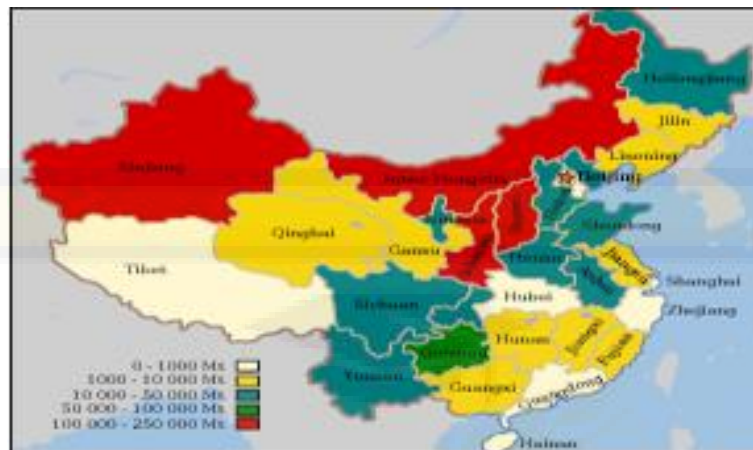


Sumber : Energy Information Administration

Data pada gambar tersebut menjelaskan bahwa AS memang merupakan negara dengan konsumsi minyak yang paling tinggi, sehingga AS membutuhkan dan harus mencari pasokan minyak di wilayah-wilayah negara dengan penghasil minyak gas yang cukup tinggi untuk mencapai tujuan dari kebutuhan negaranya.

Posisi wilayah dengan persediaan minyak terbesar terletak pada kawasan Asia Timur Tengah dan Asia Tengah. Pada kawasan Timur Tengah dapat dikatakan bahwa Amerika Serikat telah berhasil menguasai sebagian besar negara dengan produksi minyak. Namun kawasan Asia Tengah cukup sulit untuk dimasuki oleh AS, hal ini dikarenakan kebanyakan negara di Asia Tengah merupakan negara-negara pecahan Uni Soviet dan sebagian masuk kedalam wilayah teritori China (Adeline,2012). Dari seluruh wilayah-wilayah di kawasan Asia Tengah yang menghasilkan minyak dan gas adalah provinsi Xinjiang yang merupakan bagian dari wilayah China yang dihuni oleh etnis Uighur.

Gambar 4.2.2 Peta Sumber Daya Alam China



Sumber : Coal Info Mine

Di wilayah Xinjiang terdapat tiga kawasan penghasil minyak dan gas, diantaranya adalah Junggar Basin, Tarim dan Tuha, dari tiga kawasan tersebut Junggar Basin adalah kawasan yang cukup besar produksinya (Yue,2006).

4.3. Analisis Kebijakan Luar Negeri AS Kepada Kelompok Etnis Uighur

Isu Uyghur merupakan salah satu isu yang cukup menarik bagi banyak negara, bahkan menjadi topik pembahasan yang cukup penting bagi Amerika Serikat, sehingga isu ini membuat DPR dan senat Amerika Serikat berdebat memikirkan resolusi untuk konflik yang tengah terjadi kepada etnis Uighur. Konflik yang terjadi pada etnis Uyghur tersebut membuat para pembuat kebijakan AS memberikan dukungannya. Dukungan yang diberikan AS ditunjukkan dengan di sahkannya HR 497 oleh DPR AS yang mengatakan bahwa “China harus mengakui hak-hak rakyat Uighur” (Adeline,2012).

Sebelum peristiwa 9/11 terjadi AS merupakan negara yang sangat memberikan dukungannya terhadap Uyghur yang ingin membebaskan diri dari China. Berbagai bentuk kebijakan telah dilakukan oleh AS dalam mendukung kelompok Uighur dimana kebijakan tersebut berupa pemblokiran ekspor China produksi Xinjiang, Pembatasan Visa dan pembekuan aset, bahkan memblaclist beberapa perusahaan China yang terlibat pada

kekerasan yang terjadi pada etnis Uighur. Namun pasca peristiwa menara kembar yaitu World Trade Center (WTC) di New York dimana peristiwa tersebut diduga dilakukan oleh kelompok-kelompok teroris Internasional sehingga pada tahun 2001 AS melakukan Operation Enduring Freedom di Afghanistan. Dalam operasi tersebut, AS menahan banyak teroris dan sebagian dari orang-orang pada kelompok teroris tersebut adalah etnis Uighur. Ada sebanyak 22 orang etnis Uyghur yang tergabung dalam kelompok teroris ETIM (East Turkistan Islamic Movement) yang tertangkap militer AS selama serangan ke Afghanistan berlangsung (Bbc,2011).

22 orang etnis Uighur yang tertangkap dimasukkan kedalam penjara yang dikhususkan untuk tawanan pelaku terorisme di Guantanamo dan harus bersedia menerima masa tahanan sekitar lima sampai tujuh tahun, sehingga pada 24 Agustus 2005 ada sebanyak 17 orang kelompok teroris yang berasal dari Uighur di bebaskan pemerintah Amerika Serikat karena dikategorikan sebagai *No Longer Academy Combatant* (NLCs) oleh para juri panel AS (Pike,2012) , dan 5 lainnya masih menunggu keputusan AS tentang statusnya.

Meskipun telah melepaskan beberapa tawanan teroris yang berasal dari etnis Uighur, Amerika Serikat tidak ingin mengembalikan mereka ke China dengan alasan yaitu catatan tindak pelanggaran HAM yang telah dilakukan oleh etnis China kepada orang-orang Uighur tidak peduli orang tersebut terlibat kelompok teroris maupun tidak terlibat (Vogue,2009).

Tindakan yang dilakukan oleh AS tersebut membuat pemerintah China murka, sehingga di tahun 2009 pemerintah China berkeras agar tawanan Uighur di pulangkan juga menolak campur tangan atau tekanan yang dilakukan AS terkait isu terorisme di China dengan dalih pelanggaran HAM, kecaman pemerintah China tersebut di respon oleh pemerintah AS, melalui US Secretary of State Hillary Clinton, AS berencana untuk dialog lanjutan oleh pemerintah China terkait masalah teroris global (Adeline,2012).

Contoh lain dari kebijakan AS adalah bentuk dukungannya terhadap etnis Uighur melalui sosok Rebiya Kadeer yang merupakan aktivis dan pemimpin kelompok Uighur yang pernah di penjara selama enam tahun oleh pemerintah China hingga pada akhirnya di bebaskan akibat tekanan AS kepada pemerintah China disaat tahun 2005. Pemerintah Amerika Serikat memberikan kesempatan kepada pemimpin kelompok Uighur (Rebiya Kadeer) agar diperbolehkan tinggal di AS, karena dalam pembebasannya tidak luput dari campur tangan Amerika Serikat melalui badan Amnesti Internasional (Zakiya,2020).

Dukungan pemerintah AS terlihat saat terjadinya keributan atau konflik antara etnis Han dan etnis Uighur yang memakan korban sekitar 184 orang pada tanggal 5 Juli 2009 di Xinjiang (Xinhua News,2009). Dalam kerusuhan tersebut China menuduh bahwa Rebiya Kadeer yang mendalangi kerusuhan yang terjadi antara kedua etnis tersebut di Xinjiang, meskipun Rebiya Kadeer tinggal diluar China. China menganggap Rebiya Kebeer yang memimpin Kongres Uighur Dunia dan Asosiasi Amerika Uighur di dukung oleh teroris yang ada diantara warga Uighur (Xinhua News,2009).

Dalam tuduhan China tersebut, AS tetap memberikan dukungannya terhadap Rebiya Kadeer dimana terdapat anggota parlemen yang berasal dari partai demokrat dan partai republik hadir bersama Rebiya Kadeer di Capitol dan menawarkan usulan berupa jalan keluar Kongres AS untuk mengancam tindak represi kekerasan terhadap pengunjung rasa damai Uighur (Okzone.com,2009).

Bentuk kebijakan lain dari dukungan AS terhadap kelompok Uighur adalah dukungan dalam bentuk dana. Dimana dalam perjuangan etnis Uighur mendapatkan bantuan financial yang berasal dari National Endowment for Democracy (NED) yang tiap tahunnya mendapatkan alokasi dana dari Kongres AS yang jumlahnya berada di kisaran 200.000 Dollar AS untuk kelompok Uighur (Adeline,2012).

4.4. Kekuatan dan Pertumbuhan Ekonomi China

China adalah negara yang bangkit dari kemiskinan dan menjadi kekuatan ekonomi yang cukup besar saat ini. Ketika reformasi China dikenalkan di awal tahun 1979 hingga tahun 2006 PDB China tumbuh di ketinggian rata-rata 9,7% dimana ukuran ekonominya meningkat dikisaran 11 kali lipat, dan perkapita PDB tumbuh 8 kali lipat dan berhasil naik dari peringkat dunia di posisi 27 ke peringkat 3 (Elwell, Morrison, Labonte, 2007)

Table 4.4.1 Pertumbuhan Rata-Rata Tahunan PDB Rill China 1960-2006

Periode	Pertumbuhan Rata-rata Tahunan (%)
1960-1978 (pre-reformasi)	5.3
1979-2005 (post-reformasi)	9.7
1990	3.8
1991	9.3
1992	14.2
1993	14.0
1994	13.1
1995	10.9
1996	10.0
1997	9.3
1998	7.8
1999	7.6
2000	8.4
2001	8.3
2002	9.1
2003	10.0
2004	10.1
2005	9.9
2006 (est)	10.5

Sumber : CRS Report

Meningkatnya perekonomian China menyebabkan terjalinnya hubungan kasat mata pada bidang ekonomi antara AS dan China. Keseluruhan perdagangan antara kedua negara meningkat dari 49 Miliar Dollar AS di tahun 1980 hingga berada di kisaran 343 Miliar Dollar

AS di tahun 2006 (Elwell,Morrison,Labonte,2007). China dan AS merupakan mitra dagang terbesar yang menduduki urutan ke empat sebagai sumber ekspor dan peringkat kedua sebagai sumber impor. Perekonomian meningkat sangat pesat dikarenakan adanya keuntungan yang dihasilkan dari upah tenaga kerja yang lumayan murah untuk barang ekspor (Adelin,2012).

Reformasi ekonomi China dalam pertumbuhannya sebenarnya dapat memberikan keuntungan kepada AS dalam beberapa cara (Elwell,Morrison,Labonte,2007) :

1. China merupakan pasar ekspor Amerika Serikat yang perkembangannya cukup pesat diantara mitra dagang utama. Pada tahun 2006 ekspor AS ke China meningkat 33% dan di prediksi akan menggeser posisi Jepang pada tahun 2007 untuk menduduki urutan ketiga. Dengan pertumbuhan ekonomi China yang pesat serta populasi yang besar dan perkembangan pembangunannya menjadikan China sebagai pasar yang berpotensi besar bagi AS.
2. Dalam beberapa hal, China telah berhasil menggeser negara-negara Asia Timur lainnya yang merupakan sumber untuk produk manufaktur yang banyak di impor oleh AS. Produk impor yang murah dari China membantu menahan inflasi dan meningkatkan daya beli konsumen AS dan menyebabkan permintaan atas produk lain.
3. China menjadi pembeli terbesar kedua US Treasury. Pembelian tersebut guna untuk memberikan dana defisit berupa anggaran federal AS dalam mempertahankan suku bunga yang terbilang rendah.

Keseluruhan total dari hasil perdagangan AS-China naik dari 2 miliar dollar AS pada tahun 1979 hingga 457 miliar dollar AS pada tahun 2010. Diketahui bahwa impor China ke AS lebih besar dibanding ekspor AS ke China, perkembangan hubungan ekonomi antara kedua negara tersebut pada dasarnya sama-sama memberi keuntungan satu sama lain, tetapi hubungan diantara kedua negara tersebut terbilang cukup kompleks (Morisson,2011).

Hubungan antara AS dan China berlangsung cukup lama, selama dua dekade terakhir defisit perdagangan China sangat meningkat, dimana defisit tersebut naik dari 10 miliar dolar AS ditahun 1990 menjadi 266 miliar dolar AS pada tahun 2008, hal ini dijelaskan pada tabel 4.4.2 berikut :

Table 4.4.2 Perdagangan barang AS dan China 1980-2010

Tahun	Eksport AS	Import AS	Neraca Perdagangan AS
1980	3.8	1.1	2.7
1985	3.9	3.9	0.0
1990	4.8	15.2	-10.4
1995	11.7	45.6	-33.8
2000	16.3	100.1	-83.8
2005	41.8	243.5	-201.6
2006	55.2	287.8	-232.5
2007	65.2	321.5	-256.3
2008	71.5	337.8	-266.3
2009	69.6	296.4	-226.8
2010	91.9	364.9	-273.1
Proyeksi 2011	109.2	410.64	-301.4

Sumber : U.S. International Trade Commission DataWeb

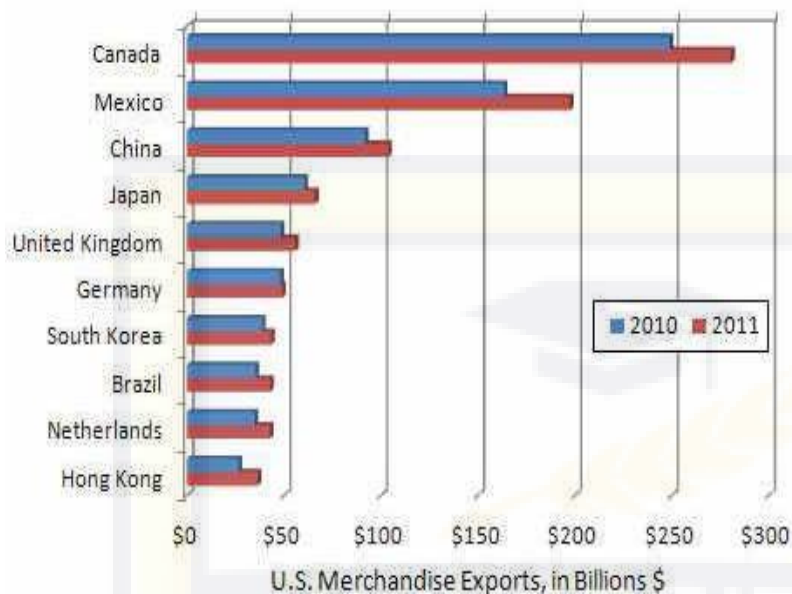
Ekspor barang Amerika Serikat terhadap China pada tahun 2010 mencapai 91,9 M dolar AS (meningkat 32,1% dari tahun 2009). China menggeser posisi Jepang sebagai sumber terbesar ketiga ekspor barang AS periode 2007- 2010. Adapun barang-barang yang di ekspor AS ke China pada 2010 berupa biji-bijian, limbah, skrap, semi konduktor dan komponen elektronik, pesawat dan suku cadang, resin, karet sintetis dan serat hal ini dapat dilihat pada table 4.4.3 dan gambar 4.4.1

Table 4.4.3 Ekspor Utama AS ke China 2005-2010

Deskripsi	2005	2006	2007	2008	2009	2010	Perubahan 2009–2010 (%)
Minyak sayur dan biji-bijian (terutama kedelai)	2,339	2,593	4,145	7,316	9,376	11,208	19.5
Limbah dan Skrap	3,670	6,071	7,331	7,562	7,142	8,561	19.9
Semikonduktor dan komponen elektronik Lainnya	4,015	6,830	7,435	7,475	6,042	7,555	25.1
Aerospace produk dan komponen (terutama pesawat)	4,535	6,309	7,447	5,471	5,344	5,766	7.9
Resin, karet sintetis, dan buatan & serat sintetis & filamen	2,127	2,548	3,290	3,524	4,036	4,336	7.4
Jumlah Ekspor AS ke China	41,837	55,224	65,238	71,457	69,576	91,878	32.1

Sumber : CRS Report

Gambar 4.4.1 Pasar Eksport Utama AS 2010



Sumber : CRS Report

Selain ekspor import tersebut, hak milik China atas Public and Privat Securities AS cukup signifikan, US Treasury Securities adalah sekuritas terbesar AS yang hak miliknya berada dibawah kuasa China. Kepemilikan China atas surat berharga meningkat dari yang awalnya 118 miliar dolar AS pada tahun 2002 menjadi sekitaran 1,160 miliar dolar AS pada akhir tahun 2010. Hal ini dapat dilihat pada table 4.4.4

Table 4.4.4 Kepemilikan China Atas Treasury Securities

Negara	2001	2010	Perubahan 2009-2010 (%)	Perubahan 2001-2010 (%)
Kanada	163.7	248.2	21.2	51.6
Mexico	101.5	163.3	26.6	60.9
China	19.2	91.9	32.1	378.6
Jepang	57.6	60.5	18.3	5.0
UK	40.8	48.5	6.1	18.9
Jerman	30.1	48.2	11.3	60.1
Korea Selatan	22.2	38.8	35.6	74.8
Brasil	15.9	35.4	35.1	122.6
Belanda	19.5	35.0	8.2	79.5

Singapore	17.8	29.2	30.8	64.0
Dunia	731.0	1,277.5	20.9	74.8

Sumber : U.S. Department of the Treasury

Sebagai negara sumber impor terbesar di AS, pada tahun 2010 China berhasil mencapai 365 miliar dollar AS, Impor AS dari China meningkat sebesar 23,1 persen pada tahun 2010. Sebelumnya 19,1 persen dari impor AS pada tahun 2010 (dibandingkan dengan 8,2 persen pada 2000). sebagai sumber impor AS telah meningkat secara drastis, dari terbesar kedelapan pada tahun 1990, menjadi keempat pada tahun 2000, kedua tahun 2004 – 2006 dan pertama pada tahun 2007-2010. Lima besar barang-barang impor AS dari China pada tahun 2010 adalah komputer dan bagian-bagiannya, berbagai macam barang (seperti mainan, permainan, dll), peralatan komunikasi dan suku cadang, pakaian, peralatan audio dan video (lihat Tabel 4.4.4). Impor AS dari China dari Januari sampai Juli 2011 naik sebesar 12,5% pertahun.

4.5. Analisis Hubungan AS dan China Pasa disahkannya UU Uighur

Disahkannya UU Uighur oleh DPR AS bertujuan untuk menangkal penahanan sewenang-wenang, penyiksaan dan pelecehan yang dilakukan oleh pemerintah China. UU Uighur tersebut sudah menargetkan sejumlah pejabat China, salah satunya adalah sekretaris partai komunis China di wilayah Xinjiang, UU Uighur tersebut disahkan dengan jumlah perbandingan suara 407: 1 (Utomo, 2019).

Dalam UU Ham Uighur tersebut menyatakan bahwa China telah melakukan tindak diskriminasi secara sistematis dengan mencabut hak politik dan hak sipil muslim Uighur di Xinjiang. adapun isi dari UU Uighur tersebut mencakup beberapa kebijakan yang diduga telah dilakukan oleh pemerintah China kepada kaum minoritas muslim di Xinjiang, seperti :

1. Pengawasan teknologi tinggi, termasuk di dalamnya pengumpulan sampel DNA dari anak-anak
2. Penggunaan kode QR ketika etnis minoritas itu keluar rumah, untuk melihat seberapa banyak mereka beribadah

3. Piranti pengenalan wajah serta suara, dan menerapkan pusat data "kebijakan pencegahan".

Dalam rancangan UU Uighur memberikan kewenangan kepada pemerintah AS yaitu presiden trump untuk menjatuhkan sanksi terhadap China atas dugaan penindasan yang dialami kaum minoritas muslim Uighur. Tujuan dari disahkannya UU Uighur tersebut untuk mengatasi pelanggaran Ham skala besar-besaran termasuk penahanan massal lebih dari 1 juta muslim Uighur. China, sebagaimana disebutkan dalam RUU, juga melakukan "diskriminasi sistematis" terhadap warga Uighur dengan cara "menafikan berbagai hak politik dan sipil, termasuk kebebasan berekspresi, beragama, bergerak dan persidangan yang adil" (BBC News,2020).

Dalam penetapan UU Uighur tersebut, China memberikan ancaman akan mengambil langkah dan tindakan balasan terhadap keputusan yang dibuat AS tersebut. Dimana menurut pemerintahan China UU tersebut secara sengaja merendahkan kondisi HAM di China di wilayah Xinjiang dan dengan ceroboh menodai upaya-upaya China untuk memberantas ekstremisme dan memerangi terorisme, secara kejam menyerang kebijakan pemerintah China dalam memerintah Xinjiang (Chunying,2021).

China mengambil tindakan dengan membuat berita dan menunjukkan pernyataannya bahwa pemerintah China telah murka terhadap AS hanya beberapa hari setelah AS mesahkan Undang Undang Uighur tersebut .

Dari semua penjelasan yang diuraikan diatas, perkembangan ekonomi China dan minyak gas yang ada wilayah Xinjiang merupakan alasan yang membuat AS terlibat dan mengambil beberapa kebijakan terkait isu-isu yang terjadi di China termasuk isu genosida muslim etnis Uighur. Kepentingan AS terkait isu genosida etnis Uighur ini bukan hanya sekedar untuk eksploitasi dan ekspansi minyak, gas ataupun sumber alam lainnya, ada banyak hal yang dipertimbangkan AS atas kebijakan-kebijakannya terkait etnis Uighur. Mengingat

ketergantungan AS terhadap China dalam ekonominya terus meningkat hal tersebut tentunya menjadi pertimbangan penting juga untuk AS agar tetap menjalin hubungan baik dengan China.

Dari penjelasan yang penulis uraikan diatas maka hal tersebut sesuai dengan penjelasan terkait konsep hubungan bilateral dimana hubungan yang terjalin atau melibatkan dua negara untuk mencapai kepentingan nasional dalam aspek ekonomi, politik, keamanan serta pertahanan merupakan bentuk dari hubungan bilateral, dan juga tentang bagaimana pola kebijakan hubungan bilateral meliputi proses respon atau kebijakan aktual dari negara yang menginisiasi suatu kebijakan untuk negara lain.



BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan konsep hubungan bilateral untuk menjawab faktor-faktor yang mempengaruhi hubungan bilateral AS-China dalam isu genosida etnis Uighur pasca diterapkannya UU Uighur. Adapun kesimpulan yang ditarik penulis dari penelitian ini adalah :

1. Genosida muslim Uighur yang terjadi di Xinjiang merupakan praktek pelanggaran Ham yang berbentuk penindasan, pelecehan dan juga kekerasan yang di lakukan pemerintah China dalam sebuah kamp. pelanggaran kebebasan beragama juga dilakukan dimana Pemerintah Tiongkok melarang kaum Muslim Uighur di Xinjiang untuk melakukan kegiatan dan kewajiban beribadah menurut agamanya, warga kaum Muslim Uigur juga dilarang untuk melakukan ritual keagamaan seperti Sholat dan berpuasa pada saat bulan Ramadhan.
2. Kasus genosida muslim Uighur yang di lakukan pemerintah China, mengundang perhatian dunia Internasional, dan salah satu negara yang melibatkan dirinya dalam kasus pelanggaran Ham terhadap etnis Uighur ini adalah Amerika Serikat. Amerika Serikat mengecam tindakan represif yang dilakukan oleh pemerintah China terhadap etnis Uighur
3. Amerika Serikat dan China mengeluarkan beberapa kebijakan terhadap etnis Uighur. Adapun kebijakan yang dikeluarkan oleh kedua negara tidak serta merta didasari oleh kasus HAM melainkan ada faktor ekonomi yang menyebabkan kedua negara mengambil kebijakan tersebut, melihat wilayah Xinjiang yang dihuni oleh etnis Uighur memiliki kekayaan gas dan minyak, juga sebagai jalur sutra Tiongkok membuat China mengambil keputusan dengan melakukan migrasi domestik etnis Han

ke Xinjiang, tidak hanya itu pemerintah China juga melakukan operasi Kamp Re-Edukasi secara tersembunyi dan cukup memakan banyak korban dari etnis Uighur. Di sisi lain, kebijakan yang diambil oleh AS berupa bentuk dukungan yang diberikan kepada etnis Uighur seperti pengesahan UU Uighur Human Right Policy Act, Pemblokiran aset dan pembatasan visa kepada pihak-pihak China yang terlibat dalam operasi kamp tersembunyi tersebut, blacklist beberapa perusahaan China, dan juga dukungan berupa bantuan financial yang berasal dari National Endowment for Democracy (NED) yang tiap tahunnya mendapatkan alokasi dana dari Kongres AS yang jumlahnya berada di kisaran 200.000 Dollar AS untuk kelompok Uighur. Meski begitu, kebijakan yang diambil oleh kedua negara tersebut dilandasi oleh faktor ekonomi.

4. Keterlibatan AS dalam kasus genosida muslim Uighur di Xinjiang, menimbulkan reaksi negatif dari China, sehingga China mengecam AS karena sudah terlalu jauh mencampuri masalah internal China. Respon negatif yang diberikan China terhadap tindakan AS tentunya akan berpengaruh bagi hubungan yang sudah lama terjalin diantara kedua negara apabila AS terus-menerus melibatkan diri. Mengingat perkembangan ekonomi China yang saat ini cukup besar dan melihat China sebagai salah satu negara ekspor yang cukup besar kepada AS, sehingga AS lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan untuk menjaga hubungan diantara kedua negara tersebut.

5.2. Saran

Dari kasus kekerasan dan diskriminasi yang dialami etnis Uighur penulis berharap AS dapat mengambil tindakan yang jauh lebih tegas untuk mengecam tindakan represif China terhadap etnis Uighur, meski tidak mudah dan akan berdampak bagi hubungan kedua negara maka dari itu AS harus lebih berhati-hati dalam mengambil sebuah kebijakan dan keputusan agar tidak merugikan dirinya sendiri maupun etnis Uighur.

DAFTAR PUSTAKA

- Adelina, M. D. (2012). *Dinamika Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat Terhadap Kelompok Uighur Pada Periode 2002-2011*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Amalia, R. (2020). *Keterlibatan Negara Lain Dalam Penyelesaian Konflik Muslim Uighur Prespektif Siyash Dauliyah*. 2.
- Amelia S, F. (n.d.). *Etnisitas Dan Politik Luar Negeri : Respon Turki Terhadap Penindasan Etnis Uyghur di Xinjiang*. *Jurnal Analisis Hubungan Internasional, Vol. 2 No. 3*. Retrieved september 2013
- Ardhani, E. (2019). *Perang Dagang Antara Amerika Serikat Dengan China Pada Tahun 2018 : Trump Vs Xi Jinping*. Yogyakarta: UMY Repository. Retrieved Maret 14, 2019
- Atmaja, D. (2017). *Review Dinamika Hubungan Cina-Amerika Serikat Hubungan Kerja Sama ASEAN, Amerika Serikat dan China: Sebuah Politik Luar Negeri Penyeimbang Kekuatan Interaksi dan Dinamika dalam Politik Global Cina*. Academia edu. Retrieved Desember 23, 2017, from https://www.academia.edu/32471422/REVIEW_DINAMIKA_HUBUNGAN_CINA_AMERIKA_SERIKAT_Interaksi_dan_Dinamika_dalam_Politik_Global_Cina%20%20Pukul%2015.23
- BBC. (2011, 11 01). *China Demands Us Return Uighurs*. Retrieved from <http://news.bbc.co.uk/2/hi/8094658.stm>.
- Breuning, M. (2007). *Foreign Policy Analysis : A Comparative Introduction*. New York .
- Chen, Y.-W. (2010). *Who Made Uyghurs Visible in the International Arena? A Hyperlink Analysis*. George Mason University.
- Coplin, W. D. (n.d.). *Pengantar Politik Internasional Suatu Telaah Teoritis*. Bandung: Sinar Baru.
- Dewi, N. R., Irsyad, M., Mufarikhin, & Feriansyah, A. M. (2020). *Dinamika Kemanusiaan Muslim Uyghur di China*. *Journal of Social Science Teaching, Vol. 4 No. 1*.

- Didi, K. (1993). *Kamus Politik Internasional*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Dumbaugh, K. (2008). "Tibet: Problems, Prospects, and U.S. Policy". *CRS*.
- Elmira, L. (2018). *Diskriminasi Rasial Terhadap Minoritas Muslim Uighur di China di Tinjau Dari Hukum Islam*. hal. 3.
- Elwell, C., Marrison, W., & Labonte, M. (n.d.). *Is China a Threat to the U.S. Economy ?* Retrieved Januari 23, 2007
- Fairbanks, J. (2002, Juni 28). Former President Carter Opens Lecture Series. *The Stanford Review*. Retrieved Mei 11, 2012, from stanfordreview.org/Archive/Volume_XXVIII/Issue_6/Front_Page/frontpage2.shtml
- Fatikasari, R., & Fithriana, A. (n.d.). *Kontroversi Kebijakan Reeducasi Terhadap Etnis Uighur Oleh Pemerintah Tiongkok dalam Prespektif Hak Asasi Manusia*. *Balcony*, 178. Retrieved September 20, 2019
- Garver, J. (2003). *Foreign Relations of the People's Republic of China*. *CIEE*.
- Hamilton, L. (1994). Introduction In *Beyond MFN: Trade with China and American Interests*, Ed. James R. Lilley and Wendell L. Willkie II. *The AEI Press*.
- Harahap, J. F. (2021). *Dampak Pemberlakuan Uyghur Human Right Policy Act Terhadap Pelanggaran Ham Berat di Tiongkok dan Implikasinya Terhadap Perdamaian Dunia*. Medan: Universitas Sumatera Utara .
- Hatta, M. (2019). *Kejahatan luar Biasa (Extra Ordinary Crime)*. Aceh: Unimal Press.
- Hidayat, M. N. (2013). *Diaspora Uyghur dan Hak Sipil di Xinjiang Tiongkok*. *Jurnal*, Vol. 1 No.3, Hal 174.
- Hudson, V. (2005). *Foreign Policy Analysis : Actor-Specific Theory and The Ground of International Relations*. *International Studies Association: Blackwell Publishing*, 2.
- Hudson, V., & Vore, C. (1995). *Foreign Policy Analysis Yesterday, Today and Tomorrow*. *Mershon International Study Review*, 210.
- Id China Embassy*. (2014). Retrieved Februari 15, 2019, from "Kunjungan Xi Jinping Ekspresi Strategi Kebijakan Luar Negeri: <https://www.mfa.gov.cn/ce/ceindo//indo/xwtd/t1198937.htm>

- Kusumohamidjoyo, B. (2019). *Hubungan Internasional : Kerangka Studi Analisis*. Jakarta: Bina Cipta.
- Manalu, J. F. (2017). *Kebijakan Pivot to Asia Oleh Amerika Serikat Pada Masa Pemerintahan Barack Obama*. Universitas Katolik Parahyangan.
- Manmaid, Y. (2018). *Faktor-Faktor Penyebab Terjadi Konflik Etnis di Xinjiang*.
- Morisson, W. (n.d.). *China-U.S. Trade Issues*. Retrieved September 30, 2011
- Pike, J. (n.d.). *Eastern Turkestan Islamic Movement / Eastern Turkistan Islamic Party (ETIP)*. Retrieved 04 22, 2012
- Republika.com*. (2019, Januari 10). Retrieved from Nestapa Uighur, RRC, dan Indonesia: <https://www.republika.co.id/berita/kolom/wacana/19/01/10/pl44br440-nestapa-uighur-rrc-dan-indonesia>
- Rudi, T. M. (1993). *Teori, Etika dan Kebijakan Hubungan Internasional*. Bandung: PT. Angkasa.
- Saragih, M. F. (2015). *Tinjauan Yuridis Pelanggaran Ham Terhadap Muslim Uighur di China di Tinjau Dari Hukum Humaniter*. hal 3-4.
- Sinaga, M., & Yusril. (2021). *Ketegangan Etnis di China, Konflik Xinjiang Dalam Prespektif Konstruktivisme*. *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian, Vol 4, No. 2*.
- Treasury, U. D. (n.d.). "Major Foreign Holders of U.S. Treasury Securities". Retrieved Mei 16, 2011
- Voa Indonesia*. (n.d.). Retrieved Februari 15, 2019, from Bush Awali Kunjungan di Cina Dengan Menghadiri Kebaktian di Gereja Beijing: <https://www.voaindonesia.com/a/a-32-2005-11-20-voa2-85272952/44466.html>
- Vogue, D. (2009). Powell, Dennis; Ryan, Jason, "Guantanamo Uyghur Detainees: Coming to America ? Retrieved Mei 04, 2012, from <http://abcnews.go.com/Politics/story?id=7423474&page=1#.T82XhLCyZic>.
- Wardhani, F. K. (2010). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembelian Obligasi Amerika Serikat Oleh China Pada Tahun 2008-2009*. Jakarta: Universitas Indonesia .
- Yue, L. (2006, November 9). "Current Status of and Trends in Oil Development in Xinjiang". Retrieved from http://www.wsichina.org/back4_07.html

Zhao, R. (2019, Oktober 22). Berkeley Economic Review. Retrieved Mei 15, 2015

